

**PROSEDUR PEREKAMAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL**

**23 DI KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**



**OLEH :**

**DARA NINGGAR**

**2012410934**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2015**

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Dara Ninggar

Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 26 Mei 1994

Nim : 2012410934

Program Pendidikan : Diploma III

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : Akuntansi

Judul : Prosedur Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal  
23 Di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma III

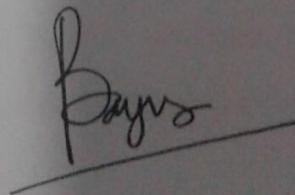
Tanggal : 04 Maret 2015



Drs. Ec. Mochammad Farid M.M

Dosen Pembimbing

Tanggal : 04 Maret 2015



Bayu Sarjono, SE, Ak, M. Ak, CA, BKP

## **LATAR BELAKANG**

Salah satu pendapatan negara yang dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri sendiri meliputi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Cukai, PBB, dan pajak lainnya, sedangkan pajak luar negeri terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut merupakan salah satu entitas pemerintah yang berfungsi untuk melayani masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak yang diharapkan dapat patuh menyetorkan pajak tahunannya atau nya. Dari latar belakang lah tersebut penulis mrnyusun Tugas Akhirnya dengan Judul "**Prosedur Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Di KPP Pratama Surabaya Rungkut**"

## **TUJUAN**

Untuk mengetahui Prosedur Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Di KPP Pratama Surabaya Rungkut

## **MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan memahami “prosedur perekaman SPT masa PPh pasal 23” serta dapat menerapkan teori ilmu yang diperoleh selama belajar di STIE Perbanas Surabaya.

## 2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan yang baik dan benar demi perbaikan dan perkembangan perusahaan kedepannya.

## 3. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang berbeda.

## 4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

## **METODE PENELITIAN**

### 1. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Rungkut ini, pada dasarnya bertujuan mendapatkan data sebagai berikut:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian yang digunakan peneliti secara umum dikelompokkan menjadi tiga metode, yaitu:

- a. Metode Interview
- b. Metode Observasi

c. Dokumentasi

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) PEREKAMAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan ini dilakukan setelah proses penerimaan dan pengolahan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak NO. SE-25/PJ/2008. Adapun prosedur perekaman SPT Masa yaitu:

1. Petugas Seksi/bagian Pengolahan Data dan Informasi menerima SPT Masa atau e-SPT Masa dari petugas Tempat Pelayanan Terpadu yang telah diberi Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
  2. Petugas seksi pengolahan Data dan Informasi kemudian melakukan perekaman secara detail, lengkap dan sesuai dengan SPT Masa atau e-SPT Masa kedalam basis aplikasi perkeaman perpajakan (SIDJP Online).
  3. Setelah proses perekaman dilakukan secara detail, lengkap dan sesuai dengan SPT Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneruskan SPT Masa dan e-SPT Masa ke Seksi Pelayan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
2. PROSES PELAKSANAAN PEREKAMAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Proses perekaman sendiri berawal dengan membuka aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) online. Dimana ruang lingkup aplikasi ini hanyalah wilayah Surabaya Rungkut, yang berarti nantinya apabila telah selesai direkam dan dinyatakan balance atau tidak balance kepala seksi/bagian PDI mengirimkan laporan kebagian pajak pusat (Jakarta). Untuk masuk bagian utama yaitu SPT induk maka mengisi nomor induk karyawan dan password. selanjutnya adalah mengisi nomor NPWP dan Masa pajak SPT Masa PPh pasal 23 untuk mencari WP Badan yang akan direkam. Setelah proses pencarian diatas, maka akan ditemukan WP badan yang akan direkam. Setelah muncul tampilan WP badan yang akan direkam, kemudian klik rekam. Tahapan dari perekaman terdiri dari **Perekaman SPT masa Induk PPh Pasal 23, Merekam bukti potong,, Mengoreksi Daftar Bukti Potong, Merekam Surat Setoran Pajak (SSP), Memvalidasi SPT Masa PPh Pasal 23.**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bagian-bagian yang terkait dalam Proses Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23 adalah seksi/bagian Pengolahan Data dan Informasi (P.D.I) dan Account Representative (AR). Aplikasi yang digunakan untuk proses perekaman di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut adalah aplikasi SIDJP. Dimana ruang lingkup aplikasi ini hanya sebatas wilayah Surabaya Rungkut saja, dimana yang nantinya KPP Pratama Surabaya Rungkut akan memberikan laporan telah selesai direkam pada Kantor Pajak Pusat (Jakarta).

Dokumen-dokum yang terkait selama proses perekaman SPT Masa PPh pasal 23 adalah Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), Bukti Penerimaan Surat (BPS), SPT Masa PPh pasal 23, daftar bukti potong, bukti potong, Surat Setoran Pajak (SSP), dan bukti pembayaran dari bank/kantor pos. Apabila SPT Masa yang sudah direkam tidak balance dan menyebabkan jumlah kurang bayar maka kepala Seksi/bagian PDI membuat laporan yang nanti dikirimkan kepada Account representative (AR), yang kemudian nantinya AR membuat Surat Teguran sehingga Wajib Pajak dapat membetulkan SPT.

### **SARAN**

#### 1. Bagi Peneliti

Para peneliti harus selalu mempelajari peraturan pajak yang berlaku dan terbaru yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

#### 2. Bagi kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Rungkut

a. Pelaksanaan Proses perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 harus sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat jendral Pajak (DJP).

b. Menambah Sumber daya Manusia sehingga Proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP).

## DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Diana, dan Lilis, Setiawati.2010.*Perpajakan Indonesia: Konsep, aplikasi dan penuntun praktis*, Yogyakarta;Andi

Mardiasmo. 2011, *perpajakan*. Edisi Revisi 2011, Yogyakarta; Andi

KPP Pratama Surabaya Rungkut, <http://www.pajak.go.id>, diakses 7 Oktober 2014